

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan pada kebijakan umum serta arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah pada tahun 2022 sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Kerangka Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2022**

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	436.954.456.000
04.01.01	Pajak Daerah	133.365.000.000
04.01.02	Retribusi Daerah	26.112.391.000
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.758.000.000
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	263.719.065.000
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.002.436.660.000
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.236.466.000
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.200.194.000
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.329.800.000
04.03.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.329.800.000
	TOTAL PENDAPATAN	2.590.720.916.000
5	BELANJA	
5,1	BELANJA OPERASI	1.944.954.380.635
05.01.01	Belanja Pegawai	1.176.897.631.294
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	696.068.699.821
05.01.05	Belanja Hibah	66.385.049.520
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	5.603.000.000
5,2	BELANJA MODAL	232.306.990.365
05.02.01	Belanja Modal Tanah	6.998.000.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.626.003.365
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.158.469.800
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.248.348.000
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.022.229.200
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.253.940.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	505.720.660.000
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	490.720.660.000
	TOTAL BELANJA	2.704.982.031.000
	TOTAL SURPLUS/DEFISIT	-114.261.115.000
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.761.115.000
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.761.115.000
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.500.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	114.031.053.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2022

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III disebutkan bahwa semula pendapatan daerah Kabupaten Tegal kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Namun terjadinya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya *shock* pada kondisi keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2022 pendapatan daerah diproyeksikan akan mulai pulih dan mengalami peningkatan.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan upaya-upaya peningkatan pemulihan dampak pandemi covid-19. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2022 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum / kewilayahan.

5.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD dan SLTP negeri termasuk di dalamnya pemberian kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) PAUD, SD dan SLTP negeri dan swasta, pembinaan potensi siswa, penguatan pendidikan karakter, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD, SD dan SLTP pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, SD dan SLTP; persentase prasarana sarana PAUD, SD dan SLTP sesuai standar; persentase keikutsertaan peserta didik PAUD, SD dan SLTP dalam even kabupaten dan nasional berjenjang; persentase guru PAUD, SD dan SLTP memenuhi kualifikasi akademik;

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penyusunan dan penetapan kompetensi dasar muatan local pendidikan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dalam bentuk dokumen pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan model pembelajaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Muatan Lokal dalam KBM sebesar 5%.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemetaan, penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio guru PAUD, SD dan SMP.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan menengah dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rekomendasi perizinan yang diterbitkan, dan persentase ijin Pendidikan khusus yang disetujui.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Kabupaten; penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Kabupaten; penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi; penerbitan izin rumah sakit Kelas C / D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten.

Indikator kinerja yang akan dicapai melalui program ini yaitu Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi, persentase peningkatan cakupan kesehatan ibu hamil; persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; persentase peningkatan cakupan kesehatan bayi; persentase peningkatan cakupan kesehatan balita; Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar , Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar; Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar; Cakupan balita stunting; Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi;

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten . Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan; . Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan pengakuan pedagang farmasi (PBF); dan penerbitan izin usaha kecil Produk Industri Rumah Tangga. Indikator kinerja program ini yaitu Cakupan produk industri rumah tangga (PIRT) pangan yang tersertifikasi dan Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten; pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarpras irigasi, selain itu juga kegiatan perencanaan teknis sarpras sumber daya air, pengelolaan hidrologi dan sistem informasi sumber daya air, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan irigasi. Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan SPAM serta inisiasi pembangunan SPAM. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Akses Layanan Air Minum.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase akses sanitasi air limbah domestik.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan system Drainase melalui peningkatan prasarana sarana drainase, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis; Rasio bangunan yang memiliki IMB.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah khususnya untuk penataan Kota Slawi di Koridor 1 dan 2 meliputi Jalan Gajah Mada, Mentri Supeno 1 dan 2, Alun-alun Hanggawana, serta Jalan Juanda. Indikator kinerja program ini adalah Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi peningkatan jalan menuju lebar 6(enam) meter, pemeliharaan rutin dan berkala; rekonstruksi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada ruas-ruas strategis. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir. Untuk mendukung perencanaan dan pengawasan penanganan jalan kabupaten dilakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis system pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar;; penggantian jembatan, dan penanggulangan bencana/tanggap darurat.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Rasio penyedia jasa konstruksi yang Sesuai Standar Teknis, dan Rasio tenaga konstruksi yang terlatih

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten, pengendalian pemanfaatan ruang, dan optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dan Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh. Program ini diarahkan pada pencapaian indicator Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan, untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penindakan pelanggaran produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan pelanggaran perda, pemberdayaan PPNS, serta sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal; pemeliharaan tramtibum, pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan konsolidasi penanganan tramtibum; pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tramtibum, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib, dan peningkatan kapasitas SDM satpol PP; Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Presentase gangguan tramtibum yang tertangani dan Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan .

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana; Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kebakaran dan non kebakaran di kabupaten, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran dan non kebakaran. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan guna untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis diluar panti, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas diluar panti, serta rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza diluar panti. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin dan anak terlantar cakupan daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten guna untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan taman makan pahlawan kabupaten guna mencapai indikator persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten.

5.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja untuk mencapai target Indikator kinerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja; dan Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, pelayanan dalam daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu indikator Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten; penetapan upah minimum kabupaten (UMK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten guna mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ARG pada belanja operasi APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten guna mencapai indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten, guna mencapai indikator kinerja Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten; Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten guna mencapai indikator kinerja Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten, guna mencapai indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.

3. PANGAN

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten; dan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media kabupaten. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase penguatan cadangan pangan, Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan.

b. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi daerah kabupaten. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Prosentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat.

b. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absepte

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah daerah kabupaten, serta untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase implementasi redistribusi tanah.

c. Program Penataan Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan tanah yang tertata di daerah kabupaten, serta untuk mencapai indicator kinerja program ini yaitu Persentase Tanah yang tertata.

5. LINGKUNGAN HIDUP

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas air dan udara melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemantauan kualitas air dan udara. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai, Presentase Pengendalian , Lahan Terkontaminasi Limbah B3.

b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten melalui pengembangan ruang terbuka hijau/RTH dengan fasilitasi bibit dan penanaman RTH. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola.

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan limbah B3 dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penanganan Limbah B3.

d. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan dengan indicator kinerja yaitu Persentase kenaikan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan untuk masyarakat.

e. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan sampah dengan indikator kinerja yaitu persentase penanganan dan pengurangan sampah.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan melalui kampanye penyuluhan lingkungan hidup, pelatihan tematik bagi masyarakat dan SDM lingkungan hidup, serta peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui penilaian sekolah peduli lingkungan/gerakan peduli lingkungan di sekolah. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup.

g. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemulihan kembali lingkungan melalui peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan, serta penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

h. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, serta pengukuran IKLH, dengan indikator kinerja yaitu persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun.

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), dengan indikator kinerja yaitu persentase pengaduan di bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan skala kabupaten untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el, Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga, dan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran dan Persentase penduduk ber akta kematian.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kerjasama antar desa dan pembangunan kawasan perdesaan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang melakukan kerjasama .

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi pembinaan pengelolaan aset dan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, guna mencapai indikator kinerja TFR (Angka kelahiran Total).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal; dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten; kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan; kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalin) untuk jalan kabupaten; kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten; kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan; kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam 1 (satu) daerah kabupaten ; kegiatan penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten ; kegiatan penetapan wilayah operasi angkutan; dan kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten. Program ini adalah dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu

Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas, . Konektivitas transportasi, dan kinerja lalulintas kabupaten;

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten antara lain melalui publikasi data dan informasi oleh badan publik, koordinasi komunitas masyarakat kehumasan, penyebarluasan konten informasi publik, penyusunan rekomendasi analisis berita dan pendapat umum, dan penyelesaian sengketa informasi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota dan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten melalui antara lain penyediaan kapasitas bandwidth; kegiatan pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten, pengembangan dan pengelolaan aplikasi berbagi pakai, peningkatan kapasitas penyelenggara *e-government*, peningkatan infrastruktur TIK di PD yang terintegrasi, dan penerbitan regulasi pengelolaan kominfo. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan dan Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada pendidikan dan latihan bagi koperasi guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian, serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.

b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha, serta peningkatan produktivitas, nilai tambah, penguatan kelembagaan.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pada pemangku kepentingan.

d. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah melalui fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, serta desain dan teknologi.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan dokumen kajian perencanaan penanaman modal daerah, dan penyusunan dokumen prospektus investasi. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, fasilitasi pendampingan terhadap calon investor dalam dan luar negeri, dan fasilitasi temu usaha terhadap pelaku usaha. Program yang dilakukan ini untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen dengan target 20%.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang penerbitan dokumennya terdigitalisasi, penyediaan layanan perizinan dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi, dan pemantauan terhadap proses pengajuan penerbitan pemenuhan komitmen oleh pemohon perizinan berusaha/komitmen. Hal tersebut yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan sebesar 80%.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan terhadap proyek yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, penyusunan laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait ketentuan pelaksanaan penanaman modal, dan pengawasan perusahaan yang ditinjau perizinannya. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kepatuhan Perusahaan sebesar 67,28%.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan analisis pengembangan aplikasi, pengintegrasian sistem informasi, dan penyusunan dokumen analisis data dan informasi penanaman modal. Indikator kinerja program ini adalah Persentase data layanan yang termanfaatkan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, serta pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan; penguatan kemitraan dengan *stakeholder*; dan penyadaran pemuda dari ancaman destruktif, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase peningkatan penyadaran pemuda; Persentase kelompok kewirausahaan pemuda dibina dan Persentase peningkatan organisasi pemuda yang aktif.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga prestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, dalam bentuk pembinaan atlet secara berjenjang; penguatan *database* keolahragaan dan penguatan kemitraan dengan *stakeholder* olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana latihan dan pertandingan, guna pencapaian indikator kinerja program yaitu Jumlah Atlet yang berprestasi, Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif, dan Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai Kebutuhan.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten melalui koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data, serta peningkatan kapasitas SDM pemda untuk peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten melalui penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi, analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi, pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik, dan penyediaan pelayanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai adalah Tingkat keamanan Informasi.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, pengelolaan kebudayaan, dan pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tradisi yang dikembangkan.

b. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pembinaan sejarah lokal kabupaten dalam bentuk pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kabupaten, fasilitasi peningkatan penulisan sejarah lokal serta penyediaan data dan informasi sejarah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada penetapan dan pengelolaan cagar budaya kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Terlestarikannya Cagar Budaya.

d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian melalui peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional dan pendidikan pelatihan SDM kesenian tradisional. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Seni dan Kesenian yang dibina.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada pengelolaan museum kabupaten melalui revitalisasi, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana museum serta penyelenggaraan even museum. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase museum yang terkelola.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan kabupaten ; pengembangan kemitraan dan jejaring perpustakaan melalui kerjasama dalam peningkatan kualitas perpustakaan kabupaten ; peningkatan budaya gemar baca pada satuan pendidikan tingkat menengah dan khusus serta masyarakat melalui pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan penyelenggaraan pameran/promosi perpustakaan; pengembangan dan pelestarian bahan pustaka; serta pengembangan layanan perpustakaan melalui layanan perpustakaan *online*, layanan perpustakaan keliling. Program ini diarahkan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola arsip dan penerapan budaya tertib arsip melalui pembinaan dan pengawasan kearsipan, serta penguatan sistem pengelolaan dan pelestarian arsip (digitalisasi arsip). Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Peningkatan nilai LAKE LKD dan Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup.

5.1.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di laut sampai dengan 4 mil; pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di daerah kabupaten ; dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu produksi dan nilai produksi ikan hasil tangkapan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai program ini adalah produksi ikan dan nilai produksi hasil budidaya. Kegiatan ini juga untuk penanganan kasus hama penyakit ikan; dan produksi benih.

c. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di daerah kabupaten. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing. Kepatuhan ini dalam rangka kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan, peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan adanya penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan, dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Indikator kinerja program ini adalah peningkatan produksi hasil dan nilai produksi olahan ikan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten, dan penetapan tanda darat usaha pariwisata kabupaten. Indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi baik, dan Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis kabupaten melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten; serta penggiatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase DTW yang dipromosikan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana kota kreatif dalam rangka mendorong perwujudan kota kreatif yang teruji petik. Indikator kinerja program ini adalah Cakupan ketersediaan sarpras kota kreatif dan Persentase OrganisasiPariwisata yang Aktif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan yang meliputi kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian melalui pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, serta pengelolaan penerbitan sertifikasi. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai yaitu persentase jumlah alsintan; persentase peningkatan produksi benih. Program ini juga diarahkan pada kegiatan meliputi kegiatan peningkatan ketersediaan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, dan peningkatan produksi ternak.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan prasarana pertanian melalui perencanaan, dalam rangka mencapai indikator program yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan produksi pertanian, Sarpras Jalan dan irigasi tingkat usaha tani, dan pelestarian sawah lestari.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular melalui pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis; penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan melalui pemenuhan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit; serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Ternak terkontrol status kesehatannya dan Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH (Jenis).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Indikator kinerja program ini adalah Rasio serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, dengan indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan kapasitas penyuluh dan kelompok pertanian.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi

b. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan bagi pelaku usaha orientasi ekspor; serta peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator peningkatan laju nilai ekspor.

c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengendalian pusat distribusi melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, serta fasilitasi pasar yang ber e-retribusi. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pasar direhabilitasi, Persentase pasar *e-retribusi*, dan Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik.

d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga melalui pemantauan harga, paket sembako murah, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang, serta kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui pengawasan pupuk bersubsidi. Indikator kinerja program ini adalah Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan promosi, sosialisasi dan pemasaran produk dalam negeri, serta penyediaan dan/atau penyampaian informasi. Program ini dalam rangka mencapai indikator kinerja Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri.

f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa, peningkatan tertib niaga, pengawasan barang beredar, pengembangan layanan sertifikasi bagi pelaku usaha. Kegiatan lain yang diarahkan dalam program ini adalah kegiatan penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi alau ukur. Indikator kinerja yang akan dicapai adalah Persentase Pedagang Tertib Ukur

7. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro melalui peningkatan SDM industri melalui pelatihan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM. Indikator yang akan dicapai melalui kegiatan dalam program ini adalah 'Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.

Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro dan non agro melalui peningkatan informasi industri di Kabupaten meliputi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan industri dan/atau kawasan industri di Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas).

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penempatan transmigran.

5.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. SEKRETARIAT DAERAH

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah; fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; serta pengembangan otonomi dan penataan urusan, serta kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana sipitual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Rata-rata kinerja OPD rumpun pemerintahan dan kesra (LKjIP), Persentase pelayanan publik OPD rumpun pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM), Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, yang diarahkan pada kegiatan kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD; pelaksanaan dan pengawasan kode etik; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kapasitas DPRD; fasilitasi tugas pimpinan DPRD; pembahasan kebijakan anggaran; penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat; serta pembahasan kerja sama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu persentase raperda yang ditetapkan; dan persentase layanan bagian humas.

5.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan, evaluasi, dan analisis data yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai tahapan dan Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan, sosial dan budaya, serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial budaya; serta persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan dalam mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu peningkatan persentase penetapan APBD tepat waktu; Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D, dan Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka pencapaian peningkatan penyusunan Laporan BMD yang baik dan tepat waktu.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu persentase peningkatan RAD terhadap APBD, Rasio Piutang Pajak dan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan pemetaan kompetensi PNS; peningkatan dan pengembangan kapasitas PNS, evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional, pemetaan PNS potensial melalui uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas bagi PNS yang memenuhi syarat, dan seleksi terbuka bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT); peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian melalui pengadaan dan pengangkatan CPNS yang transparan, akuntabel, dan kompetitif berbasis kompetensi dengan *Computer Assisted Test (CAT)*, penyelesaian layanan administrasi kepegawaian tepat waktu, dan evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan; pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis TI; serta pembinaan disiplin, kesejahteraan, perlindungan, dan penghargaan PNS. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan, Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya, Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya, Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar, dan Rasio pegawai fungsional, Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun, Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal; dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; serta asistensi dan pendampingan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal, dan Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah.

5.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik, dan Persentase lembaga pendidikan SMA/SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Ormas yang Terbina dengan target capaian 90%.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Konflik yang tertangani.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani.

5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan publik untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan Masyarakat di tingkat Kecamatan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase desa/ kelurahan maju dan mandiri.

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan dengan pencapaian indikator kinerja yaitu Presentase Penurunan Gangguan Trantibum di masing-masing Kecamatan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) di masing – masing Kecamatan.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan Persentase desa yang tertib administrasi di masing-masing Kecamatan.